

**SKRIPSI**

**ASURANSI JIWA**

**(Studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)**



Skripsi

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**

**PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA**

**NIM : C 100 060 175**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman kian lama kian pesatnya, kecanggihan teknologi dan informasi sudah merajai di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia mendatang, tidak hanya di Indonesia namun secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Dahulu manusia hanyalah ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu sandang, pangan dan papan. Namun dengan pesatnya perkembangan zaman, kini manusia tidak hanya ingin memenuhi ketiga kebutuhan tersebut melainkan semua kebutuhan yang lain juga ingin mereka penuhi. Seperti halnya untuk kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang manusia sudah terlebih dahulu ingin memenuhinya mulai dari sekarang, sebagai contohnya kebutuhan di hari tua maka manusia sudah menyiapkan dana pensiun untuk kelak di masa yang akan datang, anak – anak yang belum sekolah sudah disiapkan dananya mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat tercukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang tersebut maka sebagian manusia memerlukan asuransi. Karena asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman

dana terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan – kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.<sup>1</sup>

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengatasi risiko – risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.<sup>2</sup>

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang

---

<sup>1</sup> Dr. Sri Rejeki Hartono,SH. 1992. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.30

<sup>2</sup> M. Suparman Sastrawidjaja,SH.,SU dan Endang,SH. 1993. *Hukum Asuransi*. Bandung : Alumni. Hal. 116

dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.<sup>3</sup>

Namun Problem yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut pihak atau badan usaha lain. Yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota - anggota kelompok tersebut.

Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (*time*), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.<sup>4</sup>

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus

---

<sup>3</sup> Drs. Herman Darmawi. 2006. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara .hal .1

<sup>4</sup><http://jaringskripsi.wordpress.com/tanggung-jawab-perusahaan-asuransi-jiwa-terhadap-perkembangan-nilai-investasi-nasabah-dengan-sistem-multi-link>. 2 November 2009. Pukul 18.37 WIB

diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest*, prinsip *utmost good faith*, prinsip *indemnity*, prinsip *proximate cause*, dan prinsip kontribusi dan subrogasi.<sup>5</sup> Definisi dari prinsip *utmost good faith* menyebutkan bahwa si tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Sangat sering terjadi kesalahpahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. Prinsip *utmost good faith* seolah-olah hanya menjadi kewajiban si tertanggung, di mana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baiknya kepada penanggung. Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, sering sekali niat baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain si tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi *gray area* timbulnya konflik dari tuntutan ganti rugi. Adalah menjadi kewajiban si penanggung untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, termasuk sebelum dimulai kontrak. Apabila si penanggung tidak menjelaskan hak dan kewajiban si tertanggung, maka penanggung telah melanggar prinsip *utmost good faith*. Karena itu, ia dapat dituntut dan harus bertanggung jawab atas ganti rugi

---

<sup>5</sup> Dr. Sri Rejeki Hartono,SH. Op. Cit. Halaman 96

yang diderita tertanggung. Selain itu, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan*”.<sup>6</sup> Akan tetapi dewasa ini perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku (polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu perjanjian. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung. Sehingga sekarang ini perjanjian asuransi akan lebih mudah dan sederhana juga tidak akan memerlukan waktu yang lama.

Hal itu menyebabkan perkembangan asuransi jiwa dengan bentuk unit link atau link Assurance. Awal perkembangan produk link assurance dipicu oleh

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

*boomingnya* reksadana di pasar modal. Produk asuransi jiwa unit link dirancang dengan mengaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung investasinya. Sebenarnya produk seperti ini sudah diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan tahun 1970-an. Dan kemudian berkembang di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, China, Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Di negara kita pun kini juga banyak bermunculan produk link assurance dan bisa dikatakan berkembang pesat. Hal itu terbukti dengan meningkatnya penerimaan premi asuransi jiwa unit link dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sebesar 7,4 % dari total penerimaan premi adalah premi asuransi unit link. Sedangkan investasi yang dipilih sebesar 38% dari total investasi dalam reksadana.<sup>7</sup> Sehingga asuransi jiwa unit link dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi.

Akan tetapi terjadi pro dan kontra terhadap produk asuransi unit *linked*, sebagaimana sempat dilontarkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) dimana dianggap bahwa produk unit link ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, namun prospek asuransi unit *linked* di Indonesia menunjukkan *trend* yang cukup baik.<sup>8</sup> Pro dan kontra yang terjadi karena produk Link Assurance baru masuk ke Indonesia dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

---

<sup>7</sup> Angger P. Kompas 1 Mei 2003.

<sup>8</sup> Ketut Surendra. *Asuransi Jiwa Unit Link dalam Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika. 2004. Hal.12.

Perasuransian belum mengaturnya. Mungkin yang menjadi kendala adalah mengenai pelaksanaan asuransi jiwa unit link tersebut sehingga terjadi pro kontra. Sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk subdana untuk setiap strategi investasi. Dalam menjalankan investasinya, tentu tidak bisa sembarangan. Jenis aset yang dapat dipilih untuk membentuk subdana wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005.<sup>9</sup> Dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, kini perusahaan asuransi di Indonesia semakin banyak mengeluarkan produk yang berbasis link Assurance. Hal tersebut terbukti dengan adanya data bahwa pada tahun 1998 hanya ada 2(dua) perusahaan asuransi yang meluncurkan produk unit – link yaitu Prudential Life Assurance dan Manulife Financial. Lima Tahun kemudian, perusahaan asuransi yang menjual produk unit – link meningkat menjadi 16 perusahaan dengan jumlah produk sebanyak 53 buah.

Dengan berdasar uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul:

**“ ASURANSI JIWA (Studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta) ”**

---

<sup>9</sup><http://www.sequisreproagency.com/produk-unit-link>. 21Oktober 2009. Pukul 23.02 WIB



## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada suatu permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai. Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta ?
2. Bagaimanakah cara pengajuan klaim dalam Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta ?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mengenai Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.
  - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana cara pengajuan klaim dalam Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.

- c. Untuk menjelaskan hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pengajuan klaim Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum perdata terutama dalam hukum asuransi.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum asuransi yang termasuk ke dalam hukum perdata khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.
- c. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk , yaitu :

### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Asuransi pada

khususnya, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Asuransi dan umumnya Hukum Perdata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.<sup>10</sup>

Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>11</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi. 1997. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press. Hal.3

<sup>11</sup> Noeng Muhadjir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 3

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena masalah yang akan diteliti adalah keterikatan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris.

Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Link Assurance khususnya dalam bidang hukum asuransi. Karena hukum dikonsepsikan sebagai norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta. Selain itu, juga berupa studi empiris untuk menentukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa - hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.<sup>12</sup>

Yang pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 10

mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam hal ini khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan skripsi mengenai mekanisme pelaksanaan Link Assurance, penulis mengambil lokasi penelitian di kantor PT. Prudential Life di Surakarta.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan – tindakan sosial dan perkataan dari pihak – pihak yang terikat dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup> Data primer merupakan data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang diteliti, yaitu berupa data yang di peroleh di kantor PT. Prudential Life Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah data

---

<sup>13</sup> Lexy.J.Moelong. 1994. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. Hal 54

yang berupa dokumen, majalah, referensi dan berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen ini : observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data yang dalam penelitian deskriptif, maka dapat digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini.

### b. Studi Kepustakaan

Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data – data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan – bahan pustaka berupa buku – buku, majalah, literatur, jurnal, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>14</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta : FH UMS. Hal 47

Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa :

- a) Diperoleh konsep – konsep dan teori – teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b) Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jadwal sementara terhadap masalah penelitiannya.
- c) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.
- d) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahakan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.<sup>15</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah:

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.<sup>16</sup>

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila

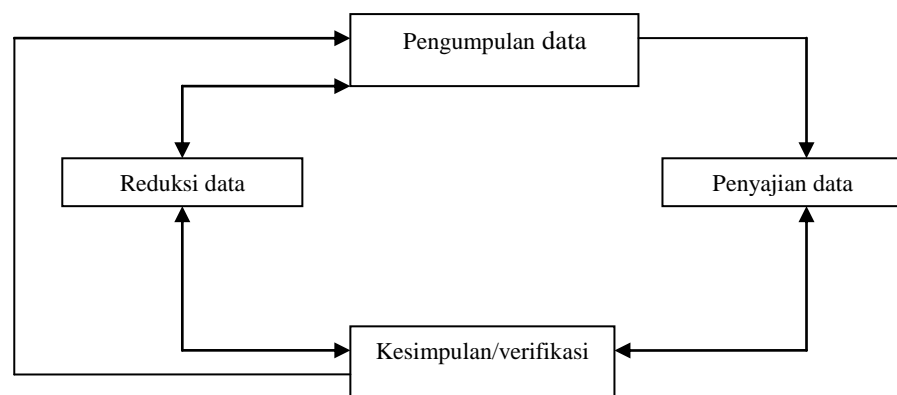
---

<sup>15</sup> Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal 117

<sup>16</sup> H.B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 34

kesimpulan kurang akurat, maka perlu di adakan verifikasi kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Model ini dinamakan dengan istilah *Interactive Model Analisis*.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menggambarkan model analisa *interactive* tersebut sebagai berikut :



Dalam penelitian ini, penulis akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan Link Assurance, kemudian tata cara pengajuan klaim Link Assurance serta tentang hambatan – hambatan dalam pengajuan klaim Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta. Dengan penggunaan data ini, maka akan diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab – bab. Yang mana satu sama lain saling



berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub – sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

## **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metodologi Penelitian

F. Sistematika Penulisan

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian dan Tujuan Asuransi
2. Dasar Hukum Asuransi
3. Jenis – Jenis Asuransi
4. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi
5. Pengertian Polis

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa

1. Pengertian dari Asuransi Jiwa
2. Dasar Hukum Asuransi Jiwa
3. Perbedaan jenis Asuransi Jiwa
4. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa

5. Berakhirnya Asuransi Jiwa

C. Tinjauan Umum tentang Link Assurance

1. Pengertian dari Link Assurance
2. Regulasi yang Mengatur Link Assurance
3. Jenis – Jenis Link Assurance
4. Pengertian Polis Link Assurance
5. Karakteristik Polis Link Assurance
6. Perbedaan Antara Asuransi Jiwa Unit Link dengan  
Asuransi Jiwa Konvensional

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Mengenai PT. Prudential Life Surakarta
- B. Mekanisme Pelaksanaan Link Assurance di PT.  
Prudential Life
- C. Tata Cara Pengajuan Klaim pada PT. Prudential Life
- D. Hambatan yang timbul dalam Pengajuan Kalim pada PT.  
Prudential Life

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN